

MENJADI DOKTOR DI USIA 34

BERKAT DUKUNGAN PUSBINDIKLATREN BAPPENAS



Menyandang gelar doktor dalam usia 34 tahun tidak pernah menjadi mimpi saya. Berkat Pusbindiklatren Bappenas, capaian hidup yang diimpikan—saja—belum itu pada akhirnya terwujud dengan hasil yang sebenarnya jauh melampaui ekspektasi saya sendiri. Apakah saya pantas berpuas diri? Seharusnya tidak. Maka tulisan ini, di samping sebetulnya rasa syukur atas seluruh nasib baik yang telah saya terima, sesungguhnya juga merupakan suatu pengingat bagi saya untuk tidak cepat berpuas diri karena masih banyak hal baik yang seharusnya saya lakukan.

Sebelum memulai studi pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), pada 2020, pekerjaan saya sehari-hari memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara untuk dan atas nama Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK)—yang didalamnya tercakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan. Sebelum bergabung dengan BPK pada awal 2014, saya telah menyandang gelar sarjana hukum (2012) dan magister hukum (2013) dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Latar belakang pendidikan hukum sangat bermanfaat dalam pelaksanaan tugas saya sehari-hari, utamanya dalam soal perencanaan pemeriksaan keuangan negara yang berdimensi hukum dan kepatuhan, pemberian pendapat dan bantuan hukum dalam pemeriksaan keuangan negara, serta pengembangan hukum pemeriksaan keuangan negara melalui kajian dan analisis, baik secara personal, lintas sektoral, maupun lintas disiplin. Keputusan saya mendaftar program beasiswa S3 Dalam Negeri Pusbindiklatren Bappenas dilatari oleh keinginan untuk

mengembangkan kapasitas diri supaya dapat lebih bermanfaat bagi organisasi, bangsa, dan negara.

Proses Seleksi: Bolak-balik Pekanbaru–Depok

Sejak 2014 hingga pengumuman pembukaan beasiswa Pusbindiklatren Bappenas pada 30 Juli 2019 saya berkantor di BPK Perwakilan Provinsi Riau yang terletak di Pekanbaru. Oleh karena itu sejak pengurusan awal pendaftaran, pengiriman berkas, hingga aneka rupa perizinan untuk mengikuti pelbagai macam seleksi, saya banyak dibantu oleh rekan-rekan dan para pimpinan di kantor pusat dan kantor perwakilan BPK.

Proses seleksi beasiswa terdiri atas tiga tahapan, yakni seleksi administrasi, tes potensi akademik (TPA), dan TOEFL. Setelah dinyatakan lulus seleksi administrasi pada 17 Oktober 2019, saya beserta 1.071

berasal dari 201 kementerian/lembaga/pemerintah daerah mengikuti TPA pada 2 November 2019. Dari empat belas lokasi tes yang tersebar di seluruh Indonesia, saya memilih Depok. Pada 18 November 2019, saya dinyatakan lulus TPA beserta 325 PNS yang berasal dari 91 kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan dipanggil untuk mengikuti TOEFL di Depok pada 30 November 2019. Alhamdulillah, pada 20 Desember 2019 saya beserta empat PNS lainnya dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, Pemerintah Kabupaten Magelang, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dinyatakan sebagai calon peserta program S3 Dalam Negeri. Selanjutnya, kami disyaratkan untuk memiliki surat penerimaan dari program studi universitas yang dituju dengan batas waktu tertentu.

Guna memenuhi persyaratan surat penerimaan tersebut, maka saya kembali bolak-balik

Pekanbaru–Depok (dan Salemba) karena kampus tujuan saya adalah Program Studi Doktor Ilmu Hukum FHUI. Alasan saya memilih prodi tersebut adalah supaya linier dengan disiplin keilmuan saya dan merupakan kampus hukum terbaik di Indonesia. Setelah menyiapkan persyaratan administrasi seperti proposal riset, pengalaman menerbitkan minimal dua artikel ilmiah, dan surat rekomendasi dari dua akademisi minimal bergelar doktor, maka saya mengikuti seleksi masuk UI, tes wawancara rencana riset oleh guru besar dan para dosen yang kelak menjadi promotor dan penguji saya, dan dinyatakan sebagai mahasiswa baru UI pada 15 Agustus 2020.

Proses Studi: Keterbatasan Interaksi di Tengah Pandemi

Sebagai mahasiswa baru Program Studi Doktor Ilmu Hukum FHUI, saya wajib mengikuti satu semester kuliah tatap muka bersama 22 mahasiswa Angkatan 2020 lainnya lintas profesi dan institusi. Namun, pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia

sejak awal Maret 2020 mengubah konsep “kuliah tatap muka” menjadi sebatas tatap muka di layar laptop. Maka satu semester berlalu tanpa interaksi fisik sama sekali. Meskipun perkuliahan dan penelitian terdampak signifikan lantaran kebijakan penjarakan fisik akibat situasi pandemi yang penuh ketidakpastian itu, saya menutup satu semester pertama dengan seluruh mata kuliah lulus dengan indeks prestasi yang menggembirakan. Ini tentu berkat keluangan waktu yang saya peroleh dari BPK dengan membebaskan saya dari segala jenis pekerjaan, di samping dukungan pendanaan dari Pusbindiklatren Bappenas yang cukup dan tepat waktu.

Usai berlalunya semester pertama, dimulailah fase sesungguhnya dari studi doktoral, yakni riset mandiri dengan bimbingan tim promotor. Pada semester kedua, masih dengan kondisi pandemi yang kian merajalela, saya memberanikan diri untuk menyampaikan proposal riset saya kepada Prof. Anna Erliyana





dengan tujuan supaya beliau berkenan menjadi promotor. Rencana riset saya adalah mengenai perkembangan hukum pemeriksaan keuangan negara di Indonesia sehingga akan ada irisan antara hukum administrasi yang menjadi keahlian beliau, hukum keuangan publik, dan hukum internasional.

Topik hukum keuangan publik telah sejak lama dirintis dan dikembangkan FHUI di bawah lektor kepala antara lain Dr. Dian Puji N. Simatupang, maka sudah dapat dipastikan beliau yang akan menjadi kopromotor. Akhirnya Prof. Anna berkenan menjadi promotor diiringi dengan rekomendasi untuk menambah satu kopromotor yang memiliki keahlian dalam hukum internasional, khususnya hukum perdata internasional. Maka ditunjuklah Yu Un Oppusunggu, Ph.D., doktor lulusan Universitas Washington yang meneliti soal hukum perdata internasional dan memiliki minat dalam sejarah hukum dan pendidikan tinggi hukum Indonesia. Pada akhir semester kedua, tepatnya 9 Agustus 2021, saya berhasil lulus ujian proposal yang ditempuh secara daring dengan dua penguji eksternal dan

tiga penguji internal FHUI.

Pengalaman Berkesan Menerbitkan Artikel Jurnal Internasional

Lulus ujian proposal merupakan sebetulnya pengesahan bahwa topik riset yang saya ajukan layak dan wajib dilanjutkan. Pada semester ketiga dan keempat saya merancang kerangka penelitian, menajamkan rumusan masalah, metode penelitian, dan teori yang akan digunakan, sembari sepanjang waktu menelusuri, mengumpulkan, dan mempelajari literatur satu demi satu. Meskipun telah lulus ujian proposal, proposal riset disertasi itu sendiri sesungguhnya bukanlah barang jadi dan final karena ia bersifat sangat dinamis, senantiasa berubah dan berkembang mengikuti perkembangan bacaan. Tantangan terbesar adalah menemukan kebaruan (*novelty*) tetapi dengan tetap memosisikan riset sebagai kelanjutan dari riset-riset terdahulu—sebagaimana adagium kaum akademik: *Nanos gigantium humeris insidentes*.

Awal semester keempat, tepatnya 1 Januari 2022, saya mulai menulis artikel untuk publikasi jurnal

internasional, yang dikerjakan secara paralel dengan riset disertasi. Berdasarkan ketentuan dari program studi, mahasiswa dapat mengikuti tahapan akhir studi doctoral, yakni sidang/ujian terbuka atau promosi, dan dinyatakan lulus jika telah menerbitkan satu artikel dengan topik yang sama dengan atau merupakan bagian dari disertasi pada jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus minimal Q3).

Pamong praja pada umumnya yang sehari-hari tidak berjibaku dengan kehidupan akademik mungkin akan sedikit mengalami gegar budaya dengan studi doctoral saat ini yang cenderung berorientasi pada publikasi ilmiah. Namun, seharusnya hal demikian dipahami dan diantisipasi sebelum mengambil studi doctoral. Menurut saya kebijakan seperti ini amat bagus untuk melatih mahasiswa dalam wacana perdebatan global yang menjadi minat risetnya, syukur-syukur dapat menyumbangkan warna lokal di tataran internasional. Dengan semangat semacam itu, maka publikasi “jalur ekspres” melalui jurnal predator merupakan laku tercela yang pantang dilakukan



“**maka publikasi “jalur ekspres” melalui jurnal predator merupakan laku tercela yang pantang dilakukan karena hanya akan menjadi aib bagi akademika dan tidak bakal diperhitungkan dalam wacana perdebatan global.**”

karena hanya akan menjadi aib bagi akademika dan tidak bakal diperhitungkan dalam wacana perdebatan global. Menyuntik literatur sepanjang waktu, seorang mahasiswa akan mampu membedakan mana literatur bermutu tinggi dan mana yang kacangan, termasuk mana jurnal yang predator dan mana yang tidak.

Pada 9 Maret 2022 draft artikel saya rampung. Setelah ditelaah tim promotor, manuskrip tersebut saya kirim ke *Utrecht Law Review* (ULR), sebuah jurnal hukum yang dikelola Universitas Utrecht. Saya mengetahui jurnal ini mula-mula lantaran kegiatan penelusuran literatur—jurnal ini menerbitkan artikel-artikel yang menjadi rujukan

riset saya. Pada 11 April 2022 naskah saya ditolak oleh editor ULR, Dr. Małgorzata Kozak, dengan alasan terlalu lokal dan kurang komparasi internasional.

Pada tanggal yang sama, saya kirim naskah tersebut ke *Transnational Legal Theory* (TLT), jurnal yang juga banyak sekali memuat artikel yang menjadi rujukan riset saya. Pada 20 Mei 2022 editor TLT, Prof. Phillip Paiement, mengirim email soal ketertarikannya terhadap naskah saya, tetapi saya harus melakukan revisi mayor dengan banyak sekali catatan. Saya mengirim revisi artikel pada 4 Juni 2022, tetapi editor rupanya tidak puas dengan hasil revisi itu sehingga pada 15 Agustus 2022 ia mengirim email penolakan naskah.

Tak patah arang, saya kirim naskah secara berturut-turut (bukan secara paralel karena hal demikian merupakan pelanggaran serius) ke *The Cambridge Law Journal*, *Asian Journal of Comparative Law*, *Journal of Corporate Law Studies*, *Asia Pacific Law Review*, *Regulation and Governance*, dan *International Journal of Auditing* (IJA). Seluruhnya ditolak dalam tahap penelaahan

awal oleh editor—terakhir IJA pada 5 Oktober 2022. Alasan penolakan pada umumnya adalah karena bahasan yang terlalu lokal Indonesia, kurangnya kajian komparatif, atau sudah banyak dikaji di artikel-artikel sebelumnya.

Selain ULR dan TLT, sebenarnya ada satu jurnal yang artikel-artikelnya selalu muncul tatkala saya melakukan penelusuran literatur dan, tentu saja, menjadi rujukan riset saya: *Accounting, Economics, and Law: A Convivium* (AEL). Sebagaimana terungkap dari gambaran umumnya, AEL bermaksud mempercakapkan dan mempertemukan kajian-kajian akuntansi, ekonomi, dan hukum dalam lensa interdisipliner dan komparatif ilmu-ilmu lain seperti sosiologi, antropologi, sejarah, keuangan, ilmu politik, dan ilmu manajemen dan kebijakan. Sedari awal saya agak segan dan sedikit pesimis dengan AEL justru karena idealisme yang kentara sekali diusung jurnal tersebut. Dengan demikian jelas bahwa AEL bukanlah jurnal predator, apalagi ia diterbitkan oleh Walter de Gruyter GmbH, penerbit yang telah berdiri sejak 1749 di Jerman.

Namun akhirnya saya putuskan mengirim manuskrip ke AEL di hari yang sama saya ditolak IJA, 5 Oktober 2022. Benar-benar di luar dugaan, editor AEL, Prof. Yuri Biondi dari CNRS Prancis, sangat antusias terhadap manuskrip saya dan langsung melanjutkan ke proses peer review. Pada 9 Januari 2023 keluar hasil revisi pertama saya, revisi mayor oleh editor dan tiga pengulas anonim, kemudian pada 15 Maret 2023 saya kirim hasil revisi saya. Pada 13 Juni 2023 keluar revisi kedua, sebuah revisi minor, lalu pada 24 Juli 2023 saya kirim kembali hasil revisi saya.

Saya sempat bergembira karena sudah revisi minor maka naskah pasti akan diterima sebentar lagi. Namun perkiraan saya meleset karena pada 24 Oktober 2023 keluar revisi ketiga, revisi minor, dan ada satu pengulas yang tidak sepakat dengan hasil revisi saya dan bersikukuh agar saya memperbaiki naskah. Namun, saya juga tetap teguh pada pendirian

saya, lantas mengirim pada 17 November 2023 hasil revisi, tanggapan, dan jawaban atas segala pertanyaan, sanggahan, dan kritik yang diajukan. Alhamdulillah, pada 21 November 2023 editor memutuskan bahwa manuskrip saya diterima untuk dipublikasikan di AEL. Setelah melalui proses pengecekan bahasa dan perwajahan, artikel yang berjudul *"Supreme Audit Institution Recommendations and the Legal System: The Case of Indonesia"* itu akhirnya terbit secara daring pada 13 Desember 2023.

Selebrasi Akademia: Wisuda dan Hal-hal Baik Setelahnya

Di sepanjang proses penulisan, submisi, penolakan, dan revisi artikel yang berkali-kali di atas, secara simultan saya juga berkali-kali memperbaiki, menulis ulang, menambah, mengurangi, dan menghapus bagian-bagian tertentu dari naskah disertasi. Proses bimbingan dengan tim promotor nyaris tanpa hambatan dan masalah.

Saya beruntung dibimbing oleh tim promotor yang sangat suportif. Hampir setiap minggu promotor menanyakan progres disertasi, kadang sembari berbagi referensi atau informasi bermanfaat. Hasil bimbingan disertasi serta catatan penolakan, rekomendasi, pertanyaan, sanggahan, dan kritik artikel pada gilirannya memperkaya konstruksi disertasi sehingga pada 14 Juli 2023 saya maju ke tahap seminar hasil penelitian (SHP) dengan revisi menengah ke minor.

Masukan dan kritik dari para penguji dalam tahap SHP kian memperkaya (dan mempertebal) naskah disertasi. Butuh kurang-lebih sembilan bulan untuk memperbaiki naskah sebelum saya pada akhirnya maju ke tahapan ujian tertutup (pra-promosi) pada 18 April 2024. Dalam ujian yang berlangsung empat jam tersebut, saya mempertahankan poin-poin argumen saya dan kemudian dinyatakan lulus. Kelulusan pada ujian tertutup dan terbitnya artikel





“

Menjadi seorang doktor, sekalipun pada mulanya tak pernah diimpikan, menyimpan tanggung jawab intelektual tertentu. Setelah ini, saya ingin berkontribusi bagi organisasi berdasarkan hasil riset saya selama empat tahun.

”

jurnal internasional memuluskan jalan ke tahapan selanjutnya. Setelah kelar merevisi sedikit naskah berdasarkan hasil ujian tertutup, pada 22 Juni 2024 dilangsungkan sidang/ujian terbuka promosi doktor dan saya dinyatakan lulus dengan predikat cum laude dan berhak menyandang gelar doktor.

Kurang dari dua bulan berikutnya, pada 6 Agustus 2024 FHUI

melaksanakan pra-wisuda yang diikuti oleh seluruh wisudawan sarjana dan pascasarjana. Dalam seremoni tersebut, saya memperoleh penghargaan dari Dekan FHUI sebagai wisudawan terbaik Program Studi Doktor Ilmu Hukum, satu-satunya dari tujuh wisudawan doktor yang berpredikat cum laude. Begitupun dalam seremoni wisuda UI pada 24 Agustus 2024 saya juga memperoleh penghargaan sebagai wisudawan terbaik dari Rektor UI.

Menjadi seorang doktor, sekalipun pada mulanya tak pernah diimpikan, menyimpan tanggung jawab intelektual tertentu. Setelah ini, saya ingin berkontribusi bagi organisasi berdasarkan hasil riset saya selama empat tahun.

Sebagai doktor hukum dari kampus hukum tertua di Indonesia bahkan Asia Tenggara, saya juga ingin menyumbangkan pemikiran demi kemajuan hukum di Tanah Air yang

kini amat carut marut. Saya ingin berkolaborasi dengan para pemikir yang memiliki kepedulian yang sama terhadap masa depan bangsa dan negara.

[Penulis: A.P. Edi Atmaja Doktor hukum Universitas Indonesia; Penelaah Teknis Kebijakan Badan Pemeriksa Keuangan RI; Karyasiswa S3 Dalam Negeri Pusbindiklatren Bappenas 2020–2024]